

LeSEHan

Pemantauan Dampak Implementasi SVLK Terhadap
Kelompok Rentan Marjinal di Jawa



FAO - EU FLEGT PROGRAMME



Sweden
Sverige



UKaid
from the British people



KATA PENGANTAR



Ga. Et aliquo vit,
si as rerumque custore,
id explam velescitem
acera ipid quide cum
quatenda ipsam idus.
Esequo ommodi corepre
pellaboris most alicatur
alis molecatus de-
riorumquae pedis am
nonsequam reptatem

quod qui ut ad ex est, inctas rernam facilis
il int voloriti con rerchiligni a es ipsuntissus
estorem dolore, aut laboribus et aut maxim
sit, et que perit volores aperuptat es molorpo-
rem id que nobit et ium abor renisimaioir aut
optur aut quiae consequia simodio nectiandi
sima sundelicil in ea alit dolorpos quia com-
niet mos pration secus.

Udaes doluptates accabor porrovit,
simus rerunt moditin re, siminci dit quodit
aut fuga. Ut re, nobisquos am que volorumto-
ria pa pro con pratrem doluptium, to iliquat.
Ulpariberum quia sequo et que recto offic to
occulles essedit ut mos ent. Bus connim et
estrunti ad el ero imil eos cus plitem utem ad
ullaborpor reseque connimus adit harum
quis diti sunt ped quam apercid eum eleescim
enisquia pa sunt. Ratet, ius. Isto derovid es-
tions erumquid es endus. Ficilla nihilis aut
voloreh enisci conserum nis ametur?

Hale Irfan Safrudi
Direktur Eksekutif

Lembaga Studi Ekosistem Hutan (LeSEHan)

EDITORIAL

Andri Suseno

CREATIVE DIRECTOR

Dwi Nor Amadi

ART DIRECTOR

Jumanto

PHOTOGRAPHY

Dwi Nor Amadi

Andri Suseno

Risky Ayu Sejati

ART & LAYOUT

Dwi Nor Amadi

Andri Suseno

OFFICE

Jl. Rimba Mulya No.11, Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota
Madiun, Jawa Timur 63117

lesehan.org@gmail.com

www.lesehan.org

01.

Kata Pengantar

oleh Direktur
LeSEHan

02.

Sekapur Sirih

oleh Direktur
LeSEHan

03.

Kebijakan SVLK

di era Covid-19

04. **Aplikasi Sistem**

Monitoring Dampak (SDM) SVLK

05. **FGD Klaten**

Pengumpulan Data Primer

06. **FGD Pasuruan**

Pengumpulan Data Primer

07. **FGD Trenggalek**

Pengumpulan Data Primer

08. **FGD Jombang**

Pengumpulan Data Primer

08. **FGD Ngawi**

Pengumpulan Data Primer

08. **Workshop**

dilaksanakan di Madiun

08. **Workshop**

dilaksanakan di DI Yogyakarta



09

Pola Kerja New Normal

Feribus dolorio nsequos vo-
lupta ped quias eliqui odias
est, essit rerchic ianditi quae
nemporecto core dolorehe-
nis quam, cuptatis exerere



05

Covid-19

Feribus dolorio nsequos vo-
lupta ped quias eliqui odias
est, essit rerchic ianditi quae
nemporecto core dolorehe-
nis quam, cuptatis exerere

SEKAPUR SIRIH

Impacts Monitoring Of SVLK Implementation On Vulnerable And Marginalised Groups

Survey data dasar implementasi SVLK ini dilaksanakan di sembilan kabupaten di tiga provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan D.I Yogyakarta. Survey ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan desain Sistem Monitoring Dampak (SMD) implementasi SVLK yang disusun pada tahun 2016 oleh PT. Hatfiled. Pada tahun 2017, dilakukan review dan perubahan pada indikator dan verifier pada desain SMD 2016. Tahun 2018, KLHK membentuk Tim Penyusunan Baseline Data Monitoring Dampak Implementasi SVLK. Tim ini bertugas membuat data dasar pada lima wilayah dampak, yaitu wilayah dampak Efektifitas Kelembagaan dan Tata Kelola, Pemberantasan Ilegal Logging, Kondisi Hutan, Pembangunan Ekonomi dan Keberlanjutan Penghidupan. Salah satu rekomendasi disebutkan bahwa penyusunan data dasar yang wilayah dampak keberlanjutan sumber penghidupan harus dilengkapi dengan pengambilan data primer. Mengingat sulitnya mendapatkan data-data sekunder untuk mengetahui data dasar wilayah dampak tersebut.

Survey ini difokuskan pada dampak pembangunan ekonomi dan dampak keberlanjutan sumber penghidupan bagi kelompok marginal dan rentan. Pengumpulan data dasar mengikuti time-series implementasi SVLK, yaitu tahun 2013 saat penandatanganan dokumen FLEGT-VPA antara Indonesia – EU, tahun 2016 saat Indonesia menerima FLEGT Licence dan tahun 2018 dua tahun

setelah Indonesia menerima FLEGT Licence.

Potret data dasar implementasi SVLK ini dapat dipergunakan untuk mengukur dampak secara series dan dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan penyempurnaan atas kebijakan SVLK. Tujuannya agar SVLK dapat menjadi jaminan atas legalitas kayu dan perbaikan tata kelola kehutanan, namun juga tetap dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian dan sumber penghidupan kelompok marginal dan rentan. Dalam hal ini adalah unit hutan rakyat, IKM, perajin, dan tenaga kerja unit usaha industri kayu.

Survey dilakukan dengan melibatkan parapihak, yaitu dinas provinsi dan kabupaten, kelompok

masyarakat, dan unit usaha di lokasi survey, yang mendukung dalam pengumpulan data. Meskipun di dalam pengumpulan data dihadapi limitasi dengan tidak tersedianya dokumen rekam data beberapa indikator dampak dan tahun yang telah ditetapkan sebagai series data. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi parapihak yang turut serta memberikan kontribusi data dan informasi dalam survey ini.

Hale Irfan Safrudi
Direktur Eksekutif
Lembaga Studi Ekosistem Hutan
(LeSEHan)

Kebijakan SVLK di Era Covid-19



Sumber : <https://www.freepik.com/>

Tantangan dan Peluang svlk di masa new Normal Achmad Zainudin, Ketua APKJ(Asosiasi Pengrajin Kayu Jepara) November 2020

Pandemi corona melanda Indonesia awal tahun 2020 yang mengakibatkan kelesuan ekonomi yang luar biasa khususnya dampak yang sangat besar untuk pengrajin kayu.

SVLK sebagai salah satu persyaratan untuk ekspor menjadi tidak menarik lagi bagi pelaku mebel lokal karena keterbatasan sumber daya ditambah lagi datangnya pandemic yang belum ada kepastian berakhir, dan juga tidak ada permintaan dari konsumen mengenai SVLK para pelaku UMKM industri mebel sangat kesulitan dalam hal penjualan produk.

Selain karena kebijakan pemerintah melakukan pembatasan aktivitas masyarakat, pelaku usaha sendiri juga dilanda ketakutan untuk beraktivitas keluar rumah dan daya beli masyarakat juga merosot tajam.

Bagi sebagian Pelaku industri kayu skala kecil lebih memilih bagaimana produksi bisa berjalan dan mengerjakan produk yang sudah berjalan,serta mulai memanfaatkan limbah yang dihasilkan dari proses produksi menjadi kerajinan.

Salah satu pelaku mebel jepara, Ponco Suhirno Co founder PT. President Furniture, mengatakan sekarang permintaan naik 50 %setelah new normal, setelah adanya kepanikan di awal tahun, buyer ingin mengamankan stok produk mereka dengan menambah jumlah pembelian furniture. Dan menyatakan bahwa

SVLK menjadi persyaratan utama karena produknya dikirimkan ke Inggris.

Perspektif Afrika, pemilik vista homedeco menggunakan media online sebagai strategi marketing baru untuk menjual produk yang dihasilkan secara langsung dengan pembeli dan memanfaatkan media sosial seperti instagram, facebook dan marketplace tokopedia dan virtual expo secara mandiri.

Seyogyanya Pemerintah selaku fasilitator bersama asosiasi mebel dan kerajinan bersama sama melakukan identifikasi

Mus cupiet ut quae.
Itatectatur, et, eatur antiore
dellora tinihil ipsunto tatum,

pelaku usaha yang bergerak dalam ekspor mebel memberikan kebijakan yang pro ukm dengan menggratiskan dan bantuan pendampingan svlk, sehingga svlk tepat guna dan bermanfaat bagi kelangsungan usaha.

Hadirnya teknologi online akan mendorong dan memudahkan pelaku UMKM mengimplementasikan perizinan yang mudah dan murah yang bisa dilakukan dari rumah, juga mendorong penyelenggaraan pameran virtual skala internasional untuk mempromosikan produk produk unggulan yang ber-svlk-secara langsung dengan buyer khususnya

dari Uni Eropa.

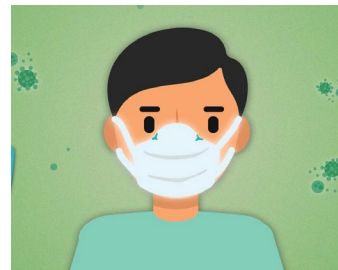
Sinergi antara pemerintah dan asosiasi perlu dibangun untuk mendorong tumbuhnya eksportir baru dan pasar pasar online skala internasional sehingga penerapan SVLK tepat sasaran dan bermanfaat bagi kelangsungan industri mebel nasional.

Bagaimana implementasi SVLK terhadap pasar lokal? Dengan skema SVLK pro UMK(usaha mikro kecil), yaitu GO, gratis dan online , maka SVLK nasional akan terwujud.

3 M MELAWAN COVID-19

MEMAKAI MASKER

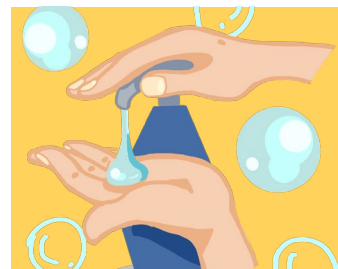
Dengan menggunakan masker, dapat melindungi diri dari *droplet* penyebab penularan Virus Corona.



<https://blog.ruangguru.com/>

MENCUCI TANGAN

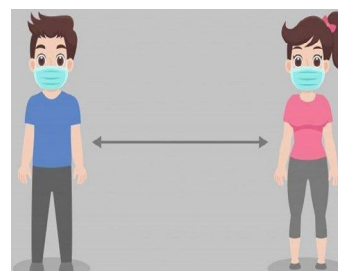
Mencuci tangan dengan Sabun dan air mengalir atau *handsanitizer* dapat membantu membunuh virus dan kuman yang berada di tangan.



<https://id.pngtree.com/>

MENJAGA JARAK

Mencegah kemungkinan menghirup *droplet* daru mulut atau hidung.



<https://health.grid.id/>

Dunt. Maximpor moluptium uta voloremquist fugia nobit rectet velibus sum cus, sintorum illiquae numenit expera doluptae pedicitint. Equamus aut et eat inveliatet eatem hit doluptiat quibea dolori cum vel id qui ullorum, ulpa dolut eaquidit officis quaspel imus dolo torem. Tem res sus platiundae volupta cuptatum explatq uibernat. Ictem aut voluptatur maionse cepudam sinciun tiusdae nonsequiae voluptias nobit, ut et faciend iassunt. Soluptia perro duntis quia ne mo volupta tempere poreius, il magnit, tendae doloratqui tota nes eumendipit esed es aliqui consend usandiandis siti rerae occusdamment fugit ulliquo doluptium faccae seque aperro que con pore porese eatiunt occabore, quia dolorum nonseribust lam fugiatio que et volum re, optat evendus



Pengumpulan Data Primer FGD di 3 Klaster: LOG YARD, SAWMILL, dan FMU di Kabupaten Trenggalek

2019-11-05 Studi, Kajian, Diskusi dan Penelitian

Trenggalek, 5/11/19. Tim LeSEHan bekerja sama dengan Food and Agriculture Organization of The United Nations dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan focus group discussion (FGD) dalam rangka Monitoring Implementasi Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK). Acara ini dilaksanakan di Kantor Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Trenggalek.

FGD ini dihadiri oleh 25 orang, di antaranya terdiri dari 20 pelaku usaha yang terbagi menjadi tiga cluster yakni FMU, TPT, dan IUIPHHK. Serta hadir pula para pegawai dari Kantor Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Trenggalek. Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh data primer dari pelaku industri kehutanan yang bersangkutan dengan dampak penerapan SVLK yang selama ini sudah dijalankan.

Kepala Seksi PSDH Mintarno dalam sambutannya menjelaskan soal industri kayu yang berkembang di Kabupaten Trenggalek. Menurutnya, saat ini sudah ada 52 industri primer berizin dan 12 TPT. Selain itu, sudah ada 22 industri primer yang kini memiliki SVLK. Dan 5 FMU yang sudah memiliki izin yang sama.

Namun meski begitu, tak semua pelaku industri yang sudah memiliki SVLK melakukan pengawasan terhadap legalitas bahan baku. Hal ini dikarenakan SVLK belum memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelaku usaha dari segi harga maupun produksi.

Sementara mereka yang melakukan pengawasan legalitas, dikarenakan tuntutan perusahaan mitra. Kebanyakan perusahaan mitra tersebut meminta pelaku industri untuk melampirkan SVLK, meskipun harga barang tidak mengalami perubahan.

Di sisi lain, semua FMU tidak melakukan pengawasan legalitas karena para pembeli biasanya membeli kayu langsung ke petani.

Awal program SVLK berjalan, para pelaku usaha berharap dapat meningkatkan hasil yang lebih baik. Namun setelah program SVLK dijalankan, hampir tak ada peningkatan yang dirasakan. Para pembeli dianggap tidak bisa membedakan produk kayu yang memiliki SVLK dengan yang tidak memiliki.

Namun meski begitu, ada perusahaan yang tetap melakukan pengawasan SVLK dengan alasan adanya tuntutan pasar, keinginan untuk menjaga lingkungan,

serta mempersiapkan diri di masa depan ketika SVLK sangat dibutuhkan.

Tak hanya itu, para pelaku usaha memiliki harapan besar untuk Pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian dalam segi biaya yang dianggap masih tinggi dan teknis pengawasan legalitas bagi industri yang memiliki SVLK. Pelaku usaha juga berharap Pemerintah memiliki kebijakan untuk mewajibkan melampirkan SVLK pada setiap pengadaan furniture bagi pasar dalam negeri. Diharapkan ke depan para pelaku usaha bisa menjalankan SVLK dengan mandiri.





FGD PENGUMPULAN DATA WILAYAH KABUPATEN KLATEN

Lembaga Studi Ekosistem Hutan (LeSEHan) mengadakan monitoring pengimplementasian Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu di Klaten pada 9 Desember 2019. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pelaku usaha kayu yang berdomisili di Klaten dan sekitarnya.

Dalam kesempatan ini, para pelaku usaha kayu di Klaten memaparkan tentang pengalaman mereka terkait dengan dokumen SVLK. Kinaria Jati, pelaku usaha kayu di Klaten, dengan jelas menyatakan bahwa SVLK sama sekali tidak membawa dampak bagi penghasilan yang ia dapat. Ia bahkan tetap bisa mengirim produk kayu tanpa harus memiliki dokumen SVLK.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Agus Susato dari Puspa Jati. Baginya SVLK tidak memiliki dampak untuk penjualannya. Selain itu, proses yang harus dilalui untuk mendapatkan SVLK sangat rumit. Ia merasa tak ada waktu untuk mengurus dokumen SVLK karena sudah terlalu sibuk dengan proses produksi.

Mursid Raharjo dari UD Pahala merasa tanpa SVLK, justru usahanya berjalan semakin baik. Ia tidak perlu memusingkan soal administrasi pengadaan dokumen SVLK yang rumit. Awalnya, ia cukup terbantu dengan proses pengadaan dokumen SVLK yang gratis. Namun saat memasuki fase pengawasan, biayanya menjadi sangat mahal hingga mencapai Rp30 juta. Ia berharap pemerintah bisa menggratiskan proses pengadaan dokumen SVLK.

Poniman dari UD Karya Jati berharap kebijakan SVLK dihapus. Dulu ia berharap bisa mendapatkan proyek pengadaan di tingkat kabupaten. Tapi pada kenyataannya, pengusaha yang mendapatkan proyek adalah mereka yang dekat dengan pemerintah. Dan belum tentu mereka memiliki dokumen SVLK.

Wahyu, perwakilan Dinas Perdagangan Klaten menjelaskan pada awal SVLK dikenalkan pada pengusaha kayu di Klaten cukup berat. Aturan dari pemerintah pun berubah setiap tahun. Dalam 2 tahun, banyak pelaku usaha kayu yang mendapatkan dokumen SVLK secara gratis. Namun ketika masuk proses pengawasan, mereka harus membayar biaya yang mahal. Itulah mengapa perlu kejelasan bagaimana SVLK dapat diterapkan secara nasional dan memiliki hukum yang jelas.

Mayoritas pelaku usaha kayu di Klaten sepakat bahwa SVLK belum membawa dampak besar bagi sumber penghasilan mereka. Menurut mereka, penerapan SVLK seharusnya pada penyediaan bahan baku saja. Tak hanya itu, pelaku usaha kayu di Klaten berharap biaya SVLK digratiskan. Karena SVLK dirasa belum memberikan peningkatan finansial.

Meski banyak kendala yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Klaten sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah Kabupaten Klaten mengeluarkan Peraturan Bupati untuk percepatan pembuatan dokumen SVLK. Namun peraturan dari Pemerintah Pusat yang masih sering berubah, membuat aturan tersebut masih sulit jika dilaksanakan di daerah.

Pasuruan - Lembaga Studi Ekosistem Hutan (LeSEHAN) bekerjasama dengan lembaga PBB FAO dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengadakan focus group discussion (FGD) melaksanakan program Monitoring Dampak Implementasi Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK), bertempat di Balai Pertemuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.

Acara ini dihadiri oleh pelaku usaha industri kehutanan, asosiasi pengusaha mebel Pasuruan, eksportir industri kehutanan, dan pejabat Pemerintah Kota dan Kabupaten Pasuruan. FGD bertujuan mengumpulkan data primer dampak penerapan SVLK bagi industri kehutanan dari para pelaku usaha.

Mualif Arif, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan mengatakan mebel adalah sumber mata pencaharian utama di Kota Pasuruan, meski bukan penghasil kayu. Pada dasarnya, SVLK adalah program Pemerintah untuk mencegah pembalakan kayu ilegal dan memperjalas legalitas sumber kayu.

Sayangnya selama 1 dekade program SVLK berjalan, belum bisa menguntungkan pelaku usaha. Hal ini disebabkan kebijakan SVLK yang selalu berubah, sehingga iklim usaha menjadi tidak pasti. Serta adanya kesepakatan ilegal antara auditor dan audite yang membuat program ini kurang berkualitas.

Asep, Ketua Forum Mebel dan Kerajinan Pasuruan mengaku bahwa SVLK belum memberikan pengaruh terhadap harga barang. Ia berharap Pemerintah lebih serius menjalankan program ini dengan memberikan akses dan fasilitas terhadap pengusaha mebel yang sudah memiliki dokumen SVLK.

Pemilik CV Aida Furniture, Hasyim memberi pendapat berbeda. Sejak

memiliki dokumen SVLK, kegiatan usaha miliknya memiliki tata administrasi yang lebih baik. Selain itu, produksi mebel juga semakin bertambah seiring semakin meluasnya pasar. Dulu hanya mampu menjangkau pasar Asia dan Cina, sejak 2018 sudah mampu merambah ke pasar Eropa.

Namun dalam segi harga, belum ada peningkatan. Hasyim berharap biaya pembuatan SVLK lebih murah, seperti harga ISO surveillance hanya Rp 5 juta.

Sementara Budiwati, Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan mengatakan Kota Pasuruan pernah mendapat penghargaan dari WWF karena kebijakan yang mengutamakan SVLK dalam lelang pengadaan mebel di Pasuruan. Walaupun secara global, SVLK belum meningkatkan harga barang.

Pengumpulan Data Primer FGD di Empat Klaster: LOG YARD, SAWMILL, SME'S, dan Eksportir di Pasuruan

2019-11-13 Studi, Kajian, Diskusi dan Penelitian



Seditat. Sitatempe ipistibus.

Sapis denti nis volest ever-speliqui cust vent fuga. Itat eosapidel eum sunduntiae. Et quunt lam quatincius estem delestrum doluptatur



Seditat. Sitatempe ipistibus.

Nusciisciis eum fuga. Itae evenis solore eatem dunt il ex et maxime doloresedi dolorio nectiae is autem et aspelita consedi pie



Seditat. Sitatempe ipistibus.

Uciumet poreper uptatem porehentio eatur sedit quo ma non consequi et aut quisque cone nat hic to equaiae aute vereceri



Pengumpulan Data Primer di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta (Jombang)

Diatempo rerferi debis dolut poritat quam, voluptae nisimi, conest fuga. Si occus, ut ius evelis es id eles as a voluptas si omnihic tempos volupti berrovit, sinume eni re

Program monitoring implementasi Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu dilaksanakan oleh Lembaga Studi Ekosistem Hutan (LeSEHan) di Jombang pada 18 Desember 2019. Kegiatan ini dihadiri oleh staff Dinas Kehutanan dan pengusaha kayu di Jombang.

Direktur LeSEHan, Hale Irfan Safrudi, dalam kesempatan tersebut memaparkan tentang program yang sedang dijalankan LeSEHan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Food and Agriculture Organization of The United Nations. Menurut Rudi, kegiatan monitoring ini bertujuan untuk menilai manfaat Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) terhadap peningkatan ekonomi pengusaha kayu.

Agung, staff Dinas Kehutanan dan Koordinator Wilayah Nganjuk menjelaskan bahwa SVLK adalah kebijakan mandatory yang harus dijalankan oleh seluruh pengusaha kayu. Menurut dia, pengusaha kayu di Nganjuk sudah ada yang melengkapi dokumen SVLK dan difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Begitu juga dengan para pelaku industri rumah tangga.

Namun, dampak SVLK belum terasa, karena hasil pengawasan menunjukkan banyak hal yang tidak dilakukan. Hanya pengusaha kayu yang melakukan ekspor saja yang bersedia memperpanjang lisensi.

Abdul Majito, pelaku industri rumah tangga menceritakan pengalamannya. Pada 2014-2015, ia mendapatkan pendampingan dari mitra usaha. Dan di tahun 2015, ia mendapatkan dokumen SVLK. Awalnya, ia berharap adanya dokumen SVLK bisa meningkatkan penjualan. Tetapi setelah tidak ada pendampingan, SVLK yang dimilikinya tidak pernah digunakan lagi. Pembeli tidak pernah menanyakan dokumen SVLK saat membeli produk kayu. Apalagi pemerintah daerah juga tidak memberikan fasilitas agar dokumen SVLK berguna. Jadi menurutnya, SVLK belum meningkatkan perekonomian industri rumah tangga.

Ahmad Yani, pelaku industri rumah tangga lain memiliki pengalaman berbeda terkait SVLK. Menurutnya, dokumen SVLK sangat penting. Ia pernah memenangkan sebuah tender untuk pengadaan perabotan di Dinas Pendidikan Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Namun ia mengaku tiba-tiba diperiksa oleh Tim Polisi Daerah Kalimantan. Untungnya, ia bisa menunjukkan dokumen yang sah.

Hal yang dapat disimpulkan dari kegiatan ini adalah SVLK dianggap sangat penting bagi sebagian besar pengusaha kayu. Namun para pengusaha kayu berharap beberapa permasalahan yang masih ada bisa segera diselesaikan oleh pemerintah.